



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2025



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377

Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Ambon, 12 Maret 2026

INSPEKTUR DAERAH

Drs. JASMONO, M.Si.,CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19741226 199412 1 003

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menginformasikan capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam tahun 2025, yang terkait dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 yang sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan merupakan mata rantai capaian kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025, diharapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dapat memberikan informasi, Gambaran yang akurat, relevan dan transparan kepada Masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Akhir kata kami berharap agar LKIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Ambon, 19 Februari 2026

**Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,**



Drs. Melkias M. Lohy, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670511 198810 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Predikat	BB	n/a	n/a
2	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	Persen	42,86 %	91,43%	100 %
3	Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	Persen	50 %	70,3 %	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persen	29,55 %	34,09 %	100 %
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	Persen	66 %	68 %	100 %

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	Persen	71,43 %	102,85%	100 %
		Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	Persen	100	102,85 %	100 %
6	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persen	25 %	29 %	100%

Ketercapaian target kinerja tahun 2025 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Dana kegiatan bersumber dari APBD berupa belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Perubahan sebesar Rp. 12.861.513.774,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.450.766.004 atau 89,03 %.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	III
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi	1
C. Maksud Dan Tujuan	8
D. Isu Strategis	8
E. Sistematika Penyajian	9
 BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 10
A. Rencana Strategis	10
B. Perjanjian Kinerja	14
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 16
A. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	 16
B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025	 17
C. Realisasi Anggaran	54
 BAB IV. PENUTUP	 58
A. Kesimpulan Pencapaian Kinerja	58
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance and Clean Government) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimasi agar penyelenggaraan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance And Clean Government) di Indonesia.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi

1. Tugas

Berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor : 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku pada BAB II Bagian Ketiga belas, Paragraf 1 Pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas

“ Membantu Gubernur Maluku dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

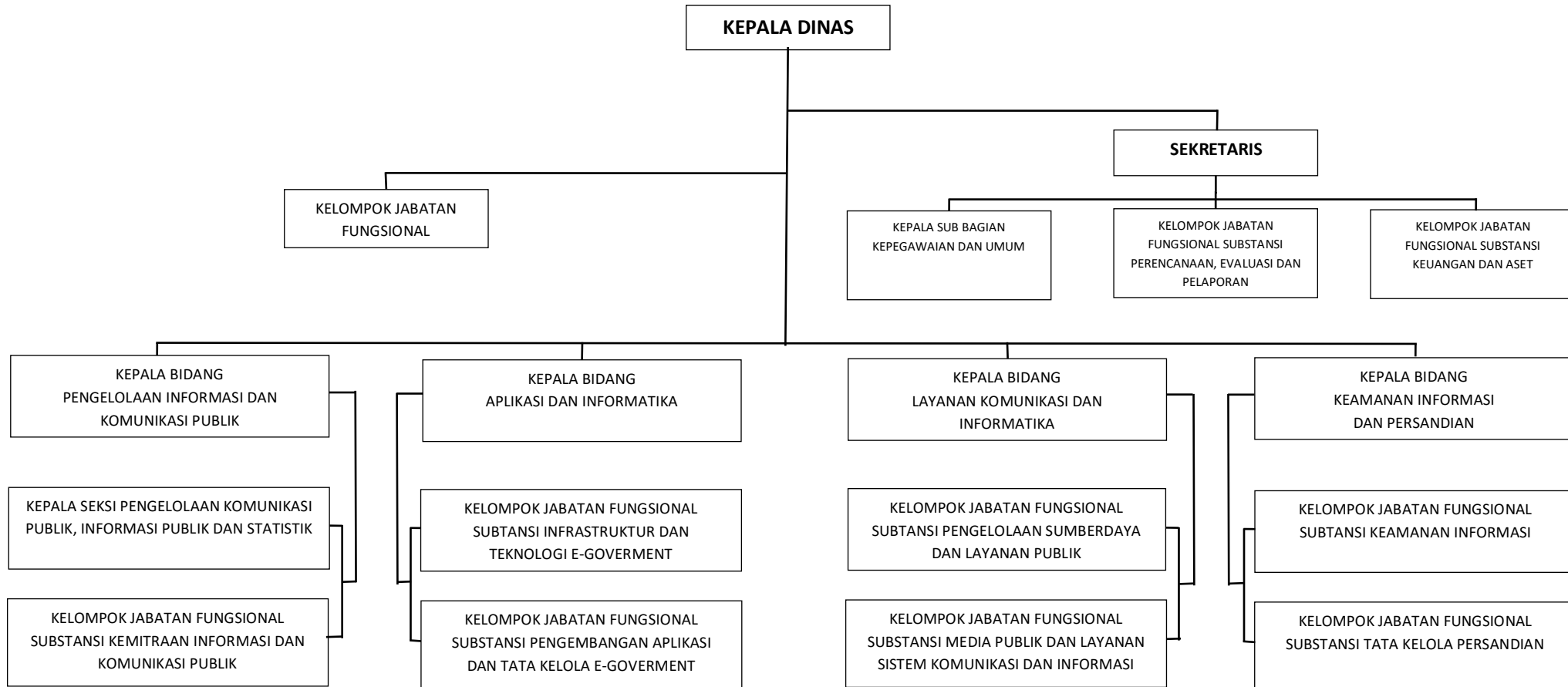
2. Fungsi

Dalam Pasal 39 ayat 1 Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Maluku, tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai fungsi (ayat 2) yaitu :

- a. Perumuskan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
- b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
- d. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
- e. Pembinaan Unit Pelaksana teknis dinas;
- f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 - 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Teknologi E-Government; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola E Government.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Informasi; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tata Kelola Persandian.
- g. Unit Pelaksana teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan pembangunan informasi dan komunikasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di dukung

oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 49 orang ditambah 26 orang tenaga kontrak. Keadaan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku secara singkat dapat dikemukakan data Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut :

❖ **Komposisi Status Kepegawaian :**

Tabel Komposisi Pegawai Menurut Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Persen
1	PNS	38 orang	(58,46 %)
2	PPPK	27 orang	(41,53 %)
	Jumlah	65 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Jabatan PNS**

Tabel Komposisi Jabatan ASN

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Persen
1	Jabatan Struktural	8 orang	(12,31 %)
2	Jabatan Fungsional Tertentu	6 orang	(9,23 %)
3	Jabatan Fungsional Umum	24 orang	(36,92 %)
4.	PP3K	27 orang	(41,54 %)
	Jumlah	65 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Data Pegawai Menurut Gender**

Tabel Komposisi Data Pegawai Menurut Gender

No.	Pegawai Menurut Gender	Jumlah	Persen
1	Laki-laki	38 orang	(58,46 %)
2	Perempuan	27 orang	(41,54 %)
	Jumlah	65 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang**

Tabel Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan unit dan Golongan Ruang

NO	URAIAN	PPPK	GOLONGAN II					GOLONGAN III					GOLONGAN IV					TOTAL
		Σ	A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	A	B	C	D	Σ	
1	Kepala Dinas														1		1	1
2	Sekretariat	16				1	1	1	5	3	1	10	1	1			2	29
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	-						3			3	6	1				1	7
4	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	6						1	3	2	1	7	1				1	14
5	Bidang Aplikasi dan Informatika (Aptika)	4						1		1	2	4	1				1	9
6	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1									3	3	1				1	5
	Jumlah																	65

❖ **Komposisi Pendidikan ASN :**

Tabel Komposisi Pendidikan ASN

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Persen
1	SD	-	(0 %)
2	SLTP	-	(0 %)
3	SLTA	16 orang	(24,62 %)
4	D III	4 orang	(6,15 %)
5	DIV	1 orang	(1,54 %)
5	S1	33 orang	(50,77 %)
6	S2	11 orang	(16,92 %)
	Jumlah	65 orang	(100 %)

❖ **Komposisi Umur ASN**

Tabel Komposisi Umur ASN

No.	Umur PNS	Jumlah	Persen
1	< 25 th	-	(%)
2	25 – 30 th	11 orang	(16,92 %)
3	31 – 40 th	23 orang	(35,38 %)
4	41 – 50 th	19 orang	(29,23 %)
5	51 – 55 th	9 orang	(13,85 %)
6	> 56 th	3 orang	(4,62 %)
	Jumlah	65 orang	(100%)

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dimaksudkan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Maluku dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. Dokumen LKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara umum LKIP ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana strategi dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku selama Tahun 2025.
2. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisa penanggulangannya selama Tahun 2025.

D. Isu Strategis

Isu – isu strategis yang dihadapi Dinas Kominfo :

1. Keterbukaan Informasi Publik wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel;.
2. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wujud penjabaran salah satu tema Reformasi Birokrasi yakni “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan”.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Menuju Satu Data Indonesia yang Akurat dan Dapat Diandalkan.
4. Penyelenggaraan keamanan SPBE harus memenuhi SNI ISO/IEC 27001 dan Pedoman Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025, sistematikanya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini memuat antara lain Latar belakang, tugas pokok dan fungsi serta susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maksud dan tujuan dan Aspek Strategis serta sistematika penyajian LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025

Bab II Perencanaan Kinerja.

Bab ini menjelaskan muatan Rencana Strategi dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Bab ini memuat antara lain uraian hasil pengukuran kinerja sasaran dari program/kegiatan maupun analisa pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025

Bab IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan menyeluruh tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 berdasarkan pada analisis pencapaian kinerja yang ada.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategi suatu instansi. Selain itu perencanaan strategi merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1(satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 mencakup komponen – komponen tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program.

Dalam Peraturan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Maluku secara organisatoris merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Maluku. Oleh karena itu Rencana Strategis yang disusun pada intinya merupakan satu kesatuan dan merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024.

1. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yang ingin dicapai adalah : “Mewujudkan Transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi”.

b. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah
4. Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
5. Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2. Strategi

1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peningkatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui seluruh saluran media milik Pemerintah Daerah
3. Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Perkominfo Nomor 4 tahun 2024 tentang Tata Kelola SPBE :
 - a. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahap Pertama dan Aplikasi Data Sektoral;
 - b. Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan kapasitas;
 - c. Peningkatan Nilai Indeks SPBE
 - d. Kerjasama lintas Instansi dalam penerapan SPBE, memanfaatkan program CSR (Corporate Social Responsibility).
4. a. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah melalui Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;
 - b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Portal Satu Data Provinsi Maluku;
 - c. Pembangunan Portal Satu Data Provinsi Maluku
5. a. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah melalui Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;
 - b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Portal Satu Data Provinsi Maluku;

- c. Pembangunan Portal Satu Data Provinsi Maluku
- 6. Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Akuntabel

3. Kebijakan

Arah kebijakan adalah Menciptakan lingkungan kelembagaan melalui tata Kelola yang berintegritas dan adaptif menuju Smart Government.

4. Program Kegiatan Tahun 2025

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Tahun 2025 antara lain:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik
 - c. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan
 - d. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan
 - b. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

II. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Relasi Media
 - b. Penyusunan Konten
 - c. Pelayanan Informasi Publik

III. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

1. Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
 - b. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

IV. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

V. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, Sub Kegiatan dari kegiatan ini antara lain :
 - a. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan proses penetapan kegiatan Tahun 2025 dan indikator kinerjanya berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Perjanjian Kinerja ini memuat antara lain komponen sasaran, program, dan kegiatan serta uraian indikator dan rencana tingkat capaian (target) masing-masing komponen yang dilaksanakan dalam Tahun 2025.

Secara garis besar Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
			Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	Predikat	BB
2	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	Persen	42,86
3	Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	Persen	50

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
			Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Persen	29,55
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	Persen	66
5.	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	Persen	71,43
		Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	Persen	100
6.	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	Persen	25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan pada Bab ini menggambarkan keberhasilan ataupun ketidaktercapaian dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku baik capaian kinerja sasaran strategis yang hendak diwujudkan Tahun 2025 maupun capaian realisasi keuangannya, penilaian kinerja ini mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021

B. Analisa Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1:
Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan1 : Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika		
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Indikator Kinerja : Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	
Kinerja Tahun 2025 :	Kinerja Tahun Sebelumnya	
Target : BB Realisasi : Dalam proses reviu APIP Capaian : n/a	Tahun 2023 : Target : B Realisasi : B Capaian : 100 %	Tahun 2024 : Target : BB Realisasi : BB Capaian : 100 %
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : BB Realisasi s.d Tahun 2025 : BB Capaian : 100 %		

a. Capaian Sasaran 1 Tahun 2025

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 1: Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	Dalam proses reviu APIP	n/a
Rata-rata Capaian Kinerja				n/a

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang dirancang untuk menjamin pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja pemerintah secara transparan dan terukur. SAKIP bertujuan untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data, mengikhtisarkan hasil, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. SAKIP mencakup beberapa komponen penting seperti:

1. Perencanaan Kinerja,
2. Pengukuran Kinerja,
3. Pelaporan Kinerja dan
4. Evaluasi Internal.

Target Tahun 2025 untuk Sasaran 1 adalah “BB” dan realisasi atau Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 masih dalam proses reviu APIP.

- b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB (72,60)	100	BB (73,35)	100	n/a	n/a

Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku memperoleh Predikat BB nilai 72,60 dan Tahun 2024 Hasil Evaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku memperoleh Predikat BB dengan nilai 73,35, Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku sudah baik pada beberapa bidang.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB (72,60)	BB (73,35)	n/a	BB

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika sudah mencapai target akhir RPD/Renstra dengan Predikat BB.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Rata-Rata Nasional.

Nilai SAKIP Nasional 2025 belum diumumkan secara menyeluruh karena evaluasi masih berlangsung. namun beberapa instansi sudah menunjukkan hasil positif seperti Universitas Syiah Kuala meraih nilai AA (Sangat Memuaskan) 91,40, dan BPS Musi Rawas naik ke predikat BB (Sangat Baik) dengan nilai 74,10.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 masih dalam proses reviu APiP sedangkan pada Tahun 2024 Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Menunjukkan nilai 73,35 dengan predikat BB (sangat baik). Hal tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sudah sangat baik pada pada beberapa aspek, baik itu aspek utama maupun aspek pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 namun ada beberapa rekomendasi yang perlu perbaikan atau tindak lanjut untuk Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

f. Analisis Program, SDM, dan Anggaran yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika” dengan indikator “Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika” didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Subtansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memiliki 3 ASN yang bertanggungjawab dalam mencapai sasaran kinerja ini.

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD memiliki Output yang dihasilkan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan outcome yang dihasilkan adalah tersedianya LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, tersedianya LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, tersedianya LKPJ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, tersedianya Laporan Papeda 12 bulan dan tersedianya Laporan Evaluasi Renja Triwulan I, II, III dan IV

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan tujuan kinerja organisasi adalah :

**Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Penunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.712.889.111	6.557.504.592	85,02	1.155.384.519
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.919.865	16.919.865	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.352.000	7.352.000	100	0

Sasaran 2:
Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik

Tujuan 2 : Meningkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik		
Sasaran 2 : Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Indikator Kinerja : Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	
Kinerja Tahun 2025 :	Kinerja Tahun Sebelumnya	
Target : 42,86 % Realisasi : 91,43% Capaian : 100 %	Tahun 2023 : Target : 14,28 % Realisasi : 14,28 % Capaian : 100 %	Tahun 2024 : Target : 28,57 Realisasi : 91,43% Capaian : 100%
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 57,14 % Realisasi s.d Tahun 2025 : 91,43 % Capaian : 100 %		

a. Capaian Sasaran 2 Tahun 2025

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 2: Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	42,86 %	91,43%	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %

Sasaran Meningkatkan Layanan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik, Tahun 2025 dengan target sebesar 42,86 % menghasilkan realisasi yang sangat baik sebesar 91, 43 %,

Adapun Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{jumlah perangkat daerah yang mengelola informasi publik (32)}}{\text{jumlah perangkat daerah yang memiliki website (35)}} \times 100 = 91,43 \%$$

Tahun 2025 ada 32 Perangkat Daerah yang telah membentuk PPID dan Mengelola Informasi Publik dari 35 Perangkat Daerah yang memiliki Website, sehingga realisasi kinerja mencapai 91,43%, melampaui target sebesar 42,86% dengan capaian 100%. Capaian ini juga telah melampaui target jangka menengah RPJMD sebesar 57,14%, yang menunjukkan meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

- b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	14,28	100	91,43	100	91,43	100

Realisasi dan capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, realisasi sebesar 14,28% telah sesuai dengan target dan mencapai capaian 100%. Pada Tahun 2024, realisasi meningkat tajam menjadi 91,43%, jauh melampaui target 28,57% dengan capaian 100%. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja tetap terjaga pada angka 91,43%, melampaui target 42,86% dan mencapai capaian 100%, yang menunjukkan bahwa kinerja tahun berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta mencerminkan peningkatan berkelanjutan dalam layanan keterbukaan informasi publik.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Informasi Publik	14,28	91,43	91,43	57,14

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi kinerja Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik sampai dengan Tahun 2025 telah melampaui target akhir RPD/Renstra, dimana target ditetapkan sebesar 57,14% sedangkan realisasi telah mencapai 91,43%, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyelenggaraan layanan keterbukaan informasi publik.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Untuk indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik, perbandingan dengan rata-rata nasional belum dapat disajikan karena belum tersedianya data nasional yang dapat dijadikan pembanding. Meskipun demikian, realisasi kinerja Tahun 2024 sebesar 91,43% menunjukkan bahwa tingkat pengelolaan informasi publik oleh perangkat daerah sudah berjalan dengan sangat baik dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap keterbukaan informasi publik.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Capaian indikator Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik di Provinsi Maluku menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai 91,43%, yang mencerminkan bahwa sebagian besar OPD telah membentuk dan menjalankan fungsi PPID dalam pengelolaan informasi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan keterbukaan informasi publik telah berjalan dengan baik pada aspek utama maupun aspek pendukung, seperti koordinasi PPID dan PPID Pelaksana. Capaian tersebut menandakan meningkatnya kepatuhan OPD terhadap kewajiban pelayanan informasi publik, meskipun masih terdapat beberapa

hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain penguatan kapasitas SDM PPID, konsistensi pemutakhiran informasi publik, dan optimalisasi sarana pendukung guna peningkatan kualitas layanan keterbukaan informasi publik pada tahun berikutnya.

f. Analisis Program, SDM, dan Anggaran yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik” dengan indikator “Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Informasi Publik” didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

Sub Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi PPID dalam melakukan koordinasi dan pembinaan kepada OPD selaku PPID Pelaksana dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Output yang dihasilkan dari sub kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah OPD yang membentuk PPID dan mengelola informasi publik secara aktif. Adapun outcome yang dihasilkan adalah terselenggaranya layanan keterbukaan informasi publik pada OPD, meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap kewajiban pelayanan informasi publik, serta terwujudnya pengelolaan informasi publik yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika memiliki 13 ASN yang mendukung terlaksananya realisasi capaian kinerja ini.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468
Pelayanan Informasi Publik	162.123.000	160.037.000	99	2.086.000

Sasaran 3:
Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah

Tujuan 2 : Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik		
Sasaran 3 : Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	Indikator Kinerja : Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	
Kinerja Tahun 2025 :	Kinerja Tahun Sebelumnya	
Target : 50 % Realisasi : 70,3 % Capaian : 100 %	Tahun 2023 : Target : 50 % Realisasi : 50 % Capaian : 100 %	Tahun 2024 : Target : 50% Realisasi : 55,5% Capaian : 100 %
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 65 % Realisasi s.d Tahun 2025 : 70,3 % Capaian : 100 %		

a. Capaian Sasaran 3 Tahun 2025

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 3: Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	50 %	70,3 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %

Sasaran “Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media Milik Pemerintah Daerah”, dengan indikator Persentase Konten

Informasi Yang Disebarluaskan Melalui Media Milik Pemerintah Daerah. Tahun 2025 memiliki target sebesar 50 % dengan realisasi 70,3 %

indikator Persentase Konten Informasi Yang Disebarluaskan Melalui Media Milik Pemerintah Daerah dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah konten yang diproduksi (703)}}{\text{target konten selama 5 tahun (1.000)}} \times 100 = 70,3 \%$$

Tahun 2025 Jumlah Konten (Media Sosial FB, IG dan Tiktok) mencapai 703 konten atau 70,3% lebih besar dari yang ditargetkan yaitu 50%, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penyebaran informasi publik melalui media milik Pemerintah Daerah.

- b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	50	100	55,5	100	70,3	100

Indikator kinerja Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah menunjukkan peningkatan yang positif dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2023, realisasi kinerja mencapai 50% dengan capaian 100%, yang menunjukkan bahwa penyebaran informasi publik telah berjalan sesuai target. Pada Tahun 2024, realisasi kinerja meningkat menjadi 55,5% dengan capaian tetap 100%, mencerminkan adanya peningkatan jumlah konten informasi yang dipublikasikan. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi kinerja kembali meningkat secara signifikan menjadi 70,3% dengan capaian 100%, yang menunjukkan bahwa upaya penyebaran informasi publik melalui media milik pemerintah daerah semakin optimal dan konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah	50	55,5	70,3	65

Untuk indikator kinerja Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah, realisasi kinerja mengalami peningkatan dari 50% pada Tahun 2023 menjadi 55,5% pada Tahun 2024, dan meningkat signifikan menjadi 70,3% pada Tahun 2025. Sementara itu, target jangka menengah yang ditetapkan pada Tahun 2026 sebesar 65%. Dengan demikian, realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 telah melampaui target jangka menengah Renstra dan menunjukkan kinerja yang optimal.

- d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 untuk indikator Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah dengan rata-rata nasional belum dapat dilakukan secara kuantitatif karena tidak tersedia data pembandingan rata-rata nasional.

- e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah ditunjukkan melalui peran aktif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam memproduksi dan mempublikasikan konten informasi kegiatan Pemerintah Daerah. Seluruh konten diproduksi oleh Dinas Kominfo dan dipublikasikan melalui media sosial resmi Maluku Prov pada platform Facebook, Instagram, dan TikTok, sehingga penyampaian informasi dapat dilakukan secara konsisten dan menjangkau masyarakat luas.

Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja, perlu dilakukan peningkatan konsistensi publikasi pada media sosial resmi, serta monitoring

dan evaluasi secara berkala terhadap kualitas dan efektivitas konten yang disebarluaskan.

f. Analisis Program, SDM, dan Anggaran yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian indikator kinerja “Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik pemerintah daerah” didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Relasi Media dan Penyusunan Konten.

Pada Sub kegiatan ini, dilakukan produksi dan publikasi informasi kegiatan Pemerintah Daerah melalui media sosial resmi Maluku Prov pada platform Facebook, Instagram, dan TikTok. Pelaksanaan sub kegiatan didukung oleh 13 ASN yang menangani fungsi informasi dan komunikasi publik, yang meskipun jumlahnya terbatas, mampu menjalankan produksi, penyusunan, dan publikasi konten secara konsisten melalui koordinasi internal yang efektif. Dukungan anggaran pada sub kegiatan ini dimanfaatkan secara efisien untuk menunjang proses peliputan, produksi, penyusunan, dan publikasi konten, sehingga capaian indikator kinerja dapat direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Berikut adalah rincian pagu dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja :

**Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik
Pemerintah Daerah**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468
Relasi Media	1.546.119.000	1.498.182.000	96,9	47.937.000
Penyusunan Konten	999.044.404	986.052.936	98,7	12.991.468

Sasaran 4:
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup
Pemerintah Provinsi Maluku

Tujuan 3 : Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		
Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku		
Indikator Kinerja : 1. Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.		
Kinerja Tahun 2025 : Target : 29,55 % Realisasi : 34,09 % Capaian : 100 %	Kinerja Tahun Sebelumnya	
	Tahun 2023 : Target : n/a Realisasi : n/a Capaian : n/a	Tahun 2024 : Target : n/a Realisasi : n/a Capaian : n/a
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 34,09 % Realisasi s.d Tahun 2025 : 29,55 % Capaian : 100 %		
Indikator Kinerja : 2. Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku		
Kinerja Tahun 2025 : Target : 66 % Realisasi : 68 % Capaian : 100 %	Kinerja Tahun Sebelumnya	
	Tahun 2023 : Target : n/a Realisasi : 29,55 Capaian : n/a	Tahun 2024 : Target : n/a Realisasi : 29,55 Capaian : n/a
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 68 % Realisasi s.d Tahun 2025 : 68 % Capaian : 100%		

a. Capaian Sasaran 4 Tahun 2025.

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 3: Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	29,55 %	34,09 %	100 %
2.	Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	66 %	68 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %

1. Indikator Kinerja 1. Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Realisasi Kinerja Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah titik infrastruktur dan jaringan PD yg terhubung (15)}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah (44)}} \times 100 = 34,09 \%$$

Realisasi (2023-2024), tertahan di angka 29,55%. Jika menggunakan asumsi jumlah 36 OPD, ini berarti hanya sekitar 10 OPD yang tercover jaringan intra selama dua tahun tersebut dan ini juga masih menggunakan struktur data OPD yang lama sebelum revitalisasi dengan daftar OPD yang terlayani Infrastruktur yakni TIK dan JIPD :

I. Sekretariat Daerah (Infrastruktur TIK Akses Internet)

- 1) Biro Pemerintahan
- 2) Biro Kesra
- 3) Biro Hukum
- 4) Biro Ekonomi
- 5) Biro Organisasi
- 6) Biro Umum

- 7) BKD
 - II. Inspektorat (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - III. Dinas Sosial (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - IV. Dinas Kominfo (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - V. Dinas Pariwisata (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - VI. Bappeda (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - VII. BPKAD (Infrastruktur TIK Akses Internet)
- Kenaikan Signifikan (2025): Terjadi kenaikan realisasi menjadi 34,09% (setara dengan penambahan layanan ke 2 OPD baru*.
- I. Sekretariat Daerah (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - 1) Biro Pemerintahan
 - 2) Biro Kesra
 - 3) Biro Hukum
 - 4) Biro Ekonomi
 - 5) Biro Organisasi
 - 6) Biro Umum
 - 7) BKD
 - 8) *Biro Pengadaan Barang dan Jasa**
 - II. Inspektorat (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - III. Dinas Sosial (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - IV. Dinas Kominfo (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - V. Dinas Pariwisata (Infrastruktur TIK Akses Internet dan JIPD)
 - VI. Bappeda (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - VII. BPKAD (Infrastruktur TIK Akses Internet)
 - VIII. *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Infrastruktur TIK Akses Internet)**
- Efektivitas: Meskipun realisasi fisik untuk keterjangkauan semua OPD memanfaatkan Infrastruktur TIK dan JIPD masih di bawah 50%, namun capaian kinerjanya mencapai 115 %. Ini menunjukkan bahwa target tahunan yang ditetapkan kemungkinan memang kecil mengingat penentuan target disesuaikan dengan angka rasional alokasi anggaran oleh Pemerintah Daerah, namun berhasil dilampaui secara signifikan oleh tim teknis di tahun 2025.

Pemerintah Provinsi Maluku dalam hal ini Bidang APTIKA Dinas Komunikasi dan Informatika, telah berhasil melampaui target fisik sebanyak 3 OPD tambahan dari yang direncanakan melalui kegiatan revitalisasi jaringan. Angka 115% menunjukkan efektivitas pelaksanaan program infrastruktur yang melebihi ekspektasi tahunan. Untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100%.

2. Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku.

Realisasi Kinerja Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah layanan yang terhubung (68)}}{\text{Ideal Jumlah layanan (100)}} \times 100 = 68 \%$$

- Konsistensi: Berbeda dengan infrastruktur yang bersifat fisik/kabel, layanan portal jauh lebih stabil dengan realisasi 66% di dua tahun awal dan naik menjadi 68% di tahun 2025.
- Kematangan Digital: Angka 68% menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga entitas atau informasi publik di lingkup Provinsi Maluku sudah terintegrasi ke dalam portal website resmi.
- Capaian: Progres ini dinilai sangat baik dengan capaian 103%, melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2025. Tetapi untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100%

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tabel Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	29,55	100%	29,55	100%	34,09 %	100%
2.	Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	66	100%	66	100%	68	100%

Analisis Perbandingan: "Tahun Ini dan Tahun-Tahun Lalu"

a) Tahun 2025 (Tahun Ini) sebagai Titik Balik

Jika tahun 2023 dan 2024 disebut sebagai "Tahun Pemeliharaan" (karena realisasinya sama persis), maka tahun 2025 adalah "Tahun Ekspansi". Peningkatan capaian hingga 115% pada sektor infrastruktur mengindikasikan bahwa manajemen berhasil mengoptimalkan sumber daya atau anggaran tahun ini melampaui rencana awal yang mungkin ditetapkan secara konservatif. Kinerja tahun ini (2025) jauh lebih unggul dibandingkan dua tahun terakhir (2023-2024). Provinsi Maluku berhasil memecahkan pola stagnasi dua tahunan pada kedua sektor digital tersebut. Sektor Infrastruktur Jaringan Intra menjadi bintang performa dengan kenaikan realisasi fisik tertinggi dan capaian kinerja paling impresif (115%). Untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100%.

b) Efisiensi Perencanaan

- Pada tahun 2023 & 2024, penetapan target terlihat sangat presisi (realisasi sama dengan target sehingga capaian 100%).
- Pada tahun 2025, terlihat adanya dorongan ekstra (extra effort). Lonjakan capaian ke 115% menunjukkan adanya keberhasilan teknis yang tidak terduga atau percepatan pengerjaan proyek yang seharusnya selesai di periode berikutnya.

- Mengingat capaian infrastruktur mencapai 115% sementara realisasinya baru 34,09%, ini mengindikasikan target tahunan yang dipasang mungkin terlalu rendah. Untuk tahun depan, target dapat dinaikkan agar lebih menantang (stretch target) tetapi dengan mempertimbangkan rasional perkiraan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Dan untuk memudahkan interpretasi penilaian kinerja tersebut dibulatkan menjadi 100%

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir Renstra

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	29,55	29,55	34,09	34,09
2.	Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	66	66	68	68

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat Kesimpulan bahwa :

- 1) Pemenuhan Target Lebih Awal (Early Achievement): Hingga tahun 2025, kedua indikator kinerja utama telah berhasil menyentuh angka 100% dari Target Jangka Menengah yang ditetapkan untuk tahun 2026. Hal ini menunjukkan adanya akselerasi program yang efektif pada tahun anggaran 2025;
- 2) Akselerasi Infrastruktur TIK: Setelah mengalami stagnasi pada angka 29,55% selama tahun 2023 dan 2024, terjadi lonjakan realisasi sebesar 4,54% di tahun 2025. Realisasi sebesar 34,09% ini secara otomatis mengunci target akhir tahun 2026 setahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan;
- 3) Optimalisasi Layanan Portal: Sama halnya dengan infrastruktur, layanan portal website menunjukkan tren kenaikan dari 66% menjadi 68% pada tahun 2025. Angka ini telah memenuhi standar target jangka menengah yang disepakati dalam dokumen perencanaan;

- 4) Dengan tercapainya target akhir 2026 pada tahun 2025 ini, maka posisi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku berada pada kategori "Sangat Tinggi". Implikasi dari capaian ini adalah:
- a. Fokus untuk tahun 2026 tidak lagi hanya pada pemenuhan target, melainkan pada pemeliharaan (maintenance) dan peningkatan kualitas layanan (quality assurance).
 - b. Mengingat target jangka menengah telah terpenuhi, instansi memiliki ruang untuk menetapkan target baru yang lebih progresif (target penyesuaian) pada periode perencanaan berikutnya guna mendukung transformasi digital yang lebih luas di seluruh OPD (mengingat cakupan infrastruktur saat ini baru menjangkau 34,09% dari total potensi).

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja Pada Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku adalah Indikator Kinerja :

1. Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.
2. Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku

Berdasarkan data informasi menunjukkan bahwa tidak tersedia secara spesifik data informasi indikator kinerja yang sesuai di Tingkat Nasional untuk dijadikan rujukan perbandingan realisasi kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dengan rata-rata di Tingkat Nasional. Rujukan yang mendekati adalah Indeks SPBE dan Indeks Keterbukaan Informasi Publik, tetapi memakai alat ukur dan perhitungan indikator yang berbeda, sehingga tidak dapat dijadikan rujukan perbandingan.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan capaian kinerja Sasaran 4 tahun 2025 yang menunjukkan angka efektivitas sebesar 115% pada aspek infrastruktur dan 103% pada layanan portal, berikut adalah analisis faktor pendukung serta langkah solutif yang telah diambil:

1) Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan melampaui target (terutama pencapaian 15 OPD dari target 13 OPD pada jaringan intra) disebabkan oleh beberapa faktor kunci:

- Optimalisasi Alokasi Anggaran dan Sumber Daya: Adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan teknis sehingga anggaran yang semula direncanakan untuk 13 OPD mampu dioptimalkan untuk menjangkau 15 OPD (34,09%).
- Komitmen Pimpinan dan Integrasi Program: Adanya dorongan kuat dari pimpinan daerah untuk mempercepat transformasi digital sebagai respon terhadap evaluasi SPBE nasional, sehingga proses koordinasi antar OPD menjadi lebih cepat.
- Kesiapan Teknis OPD: Meningkatnya kesiapan infrastruktur dasar di tingkat OPD yang menjadi sasaran, sehingga proses integrasi ke jaringan intra pemerintah provinsi tidak menemui kendala teknis yang berarti.
- Pemanfaatan Teknologi Terpadu: Penggunaan platform portal yang lebih *user-friendly* meningkatkan partisipasi OPD dalam memperbarui informasi, sehingga realisasi portal naik menjadi 68%.

2) Kendala yang Dihadapi dan Alternatif Solusi

Meskipun mencapai target, terdapat beberapa tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan, yang kemudian diatasi dengan alternatif solusi berikut:

Kendala / Tantangan	Alternatif Solusi yang Dilakukan
Ketidaktersediaannya Dokumen Perencanaan SPBE implementasi dari Peraturan Gubernur Maluku No. 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola SPBE	Pengembangan tahap utama : 1. Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Maluku; 2. Dokumen Arsitektur SPBE 3. Dokumen Peta Rencana SPBE 4. Clearance Anggaran Belanja TIK
Keterbatasan Jangkauan Fisik: Sulitnya penarikan kabel jaringan ke beberapa lokasi OPD yang terpisah jauh.	Menggunakan teknologi <i>wireless</i> Radio Microwave atau sewa jaringan fiber optik dari Provider (Contoh ; Project E-Metro Telkom) bersama (shared network) untuk memastikan konektivitas tetap terjalin tanpa biaya yang membengkak.
Keamanan Informasi: Meningkatnya risiko serangan siber seiring dengan meluasnya jaringan intra dan pemanfaatan portal.	Pengembangan dan Penambahan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) untuk mengintegrasikan data informasi serta memastikan jalur aman dan Penguatan <i>firewall</i> dan penerapan protokol keamanan standar sesuai dengan standar keamanan informasi SPBE nasional.
Update Konten Portal: Beberapa unit kerja masih	Melakukan pendampingan teknis secara intensif dan menyediakan sistem "input

Kendala / Tantangan	Alternatif Solusi yang Dilakukan
Ketidakterseediaannya Dokumen Perencanaan SPBE implementasi dari Peraturan Gubernur Maluku No. 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola SPBE	Pengembangan tahap utama : 1. Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Maluku; 2. Dokumen Arsitektur SPBE 3. Dokumen Peta Rencana SPBE 4. Clearance Anggaran Belanja TIK
lambat dalam memperbarui data pada portal website.	terpadu" yang memudahkan admin di tiap OPD untuk memperbarui informasi secara <i>real-time</i> .
Kesenjangan Target (Under-targeting): Realisasi 115% menunjukkan target awal tahunan (10 OPD) terlalu konservatif.	Melakukan penyesuaian target pada revisi rencana kerja tahunan agar lebih selaras dengan potensi kapasitas teknis yang sebenarnya dimiliki.

3) Kesimpulan Strategis

Analisis ini memotret sejauh mana posisi Pemerintah Provinsi Maluku saat ini terhadap janji jangka menengah (Target Akhir).

Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi s.d 2025	Capaian Akhir	Status
Infrastruktur TIK	34,09%	29,55%	115%*	Tercapai Melampaui Target
Portal Website	68%	68%	100%	Tercapai Sesuai Target

Secara keseluruhan, Sasaran 4 telah berhasil dicapai dengan predikat Sangat Baik.

1. Penambahan cakupan jaringan intra menjadi kontributor utama tingginya capaian kinerja sasaran ini.
2. Hingga tahun 2025, Pemerintah Provinsi Maluku telah berhasil menuntaskan kewajiban jangka menengahnya, terutama pada indikator layanan portal website yang telah menyentuh angka 100% dari target akhir.
3. Kemampuan merealisasikan 15 OPD (dari target 13) menunjukkan adanya optimalisasi sumber daya yang baik pada tahun 2025 walaupun dengan keterbatasan alokasi anggaran dan SDM.
4. Kombinasi antara efisiensi teknis di lapangan dan solusi kreatif terhadap kendala geografis/birokrasi menjadi kunci utama mengapa kinerja tahun 2025 dapat

melampaui target jangka menengah (RPJMD) lebih awal. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menuju implementasi Indeks Pemerintah Digital (PemDI) di tahun mendatang.

Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah
Provinsi Maluku

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.043.351.459	1.852.326.464	90,7	191.024.995
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	2.043.351.459	1.852.326.464	90,7	191.024.995
Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	75.100.000	74.931.500	99,8	168.500
Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.968.251.459	1.777.394.964	90,3	190.856.495

Sasaran 5:
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektor
Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)

Tujuan 5 : Menyediakan Data Statistik Sektor		
Daerah (DSSD) yang sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)		
Sasaran 5 :		
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektor		
Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)		
Indikator Kinerja :		
1. Persentase Data Statistik Sektor		
Daerah yang tersedia.		
Kinerja Tahun 2025 :	Kinerja Tahun Sebelumnya	
Target : 71,43 %	Tahun 2023 :	Tahun 2024 :
Realisasi : 102,85%	Target : 74,1 %	Target : 85,2 %
Capaian : 100%	Realisasi : 125,9 %	Realisasi : 125,9 %
	Capaian : 100 %	Capaian : 100 %
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 77,14 %		
Realisasi s.d Tahun 2025 : 102,85%		
Capaian : 100		
Indikator Kinerja :		
2. Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata		
Kinerja Tahun 2025 :	Kinerja Tahun Sebelumnya	
Target : 100 %	Tahun 2023 :	Tahun 2024 :
Realisasi : 102,85 %	Target : ? %	Target : 100 %
Capaian : 100 %	Realisasi : 93,9 %	Realisasi : 100 %
	Capaian : 100	Capaian : 100 %
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 100 %		
Realisasi s.d Tahun 2025 : 100%		
Capaian : 100 %		

a. Capaian Sasaran 5 Tahun 2025.

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 5 : Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia	71,43 %	102,85%	100%
2.	Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	100 %	102,85 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri, serta tindak lanjutnya melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 413 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Satu Data Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku selaku Walidata melaksanakan penguatan tata kelola data statistik sektoral daerah secara terencana dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses serta dibagipakaikan antar perangkat daerah.

Pelaksanaan kebijakan tersebut difokuskan pada pemenuhan empat Prinsip Satu Data Indonesia, yaitu Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta penggunaan Kode Referensi dan Data Induk, yang menjadi dasar dalam peningkatan kualitas dan integrasi data sektoral. Dalam konteks akuntabilitas kinerja, peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku diarahkan pada peningkatan ketersediaan dan kepatuhan terhadap standar pengelolaan data, yang diukur melalui indikator kinerja Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia dan Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata.

Capaian terhadap kedua indikator tersebut mencerminkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mendorong tersedianya data sektoral yang berkualitas,

terstandar, dan terintegrasi, serta menjadi dasar dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. ngan demikian, implementasi kebijakan Satu Data Indonesia melalui peran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tidak hanya berorientasi pada pemenuhan regulasi, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola data sebagai instrumen strategis dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Berikut penjelasan terkait pemenuhan kedua indikator kinerja dimaksud :

1. Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia.

Tahun 2025 indikator ini memiliki target sebesar 71,43% atau 25 Perangkat Daerah yang menyampaikan data statistik sektorialnya dan realisasinya melebihi target sebesar 102,85 % atau sebanyak 36 Perangkat Daerah yang telah menyampaikan data statistik sektorial.

Realisasi Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia ini diperoleh dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah (produsen data) yang telah mengumpulkan data statistik sektorial (36)}}{\text{Jumlah keseluruhan perangkat daerah (produsen data) (35)}} \times 100 = 102,85 \%$$

Daftar Data Statistik Sektorial 36 Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Pemenuhan Data Statistik Sektorial yang Tersedia

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
1.	Sekretariat Daerah (Biro Administrasi Pimpinan)	Jumlah data: 48 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
2.	Sekretariat DPRD	Jumlah data: 33 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
3.	Inspektorat	Jumlah data: 13 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah data: 304 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SPM, dan SIPD e-Walidata.

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
5.	Dinas Kesehatan	Jumlah data: 75 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SPM, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah data: 53 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Jumlah data: 34 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK, SPM dan SIPD e-Walidata.
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah data: 19 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
9.	Dinas Sosial	Jumlah data: 17 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah data: 45 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
11.	Dinas Ketahanan Pangan	Jumlah data: 23 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
12.	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah data: 24 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
13.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah data: 7 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah data: 13 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
15.	Dinas Perhubungan	Jumlah data: 18 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah data: 37 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah data: 17 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
18.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Jumlah data: 18 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
19.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	Jumlah data: 30 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jumlah data: 43 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
21.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jumlah data: 83 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
22.	Dinas Pariwisata	Jumlah data: 21 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata
23.	Dinas Pertanian	Jumlah data: 57 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
24.	Dinas Kehutanan	Jumlah data: 28 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
25.	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	Jumlah data: 10 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
26.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah data: 40 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
27.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jumlah data: 46 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data: 24 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata
29.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Jumlah data: 34 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK, SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
30.	Badan Pendapatan Daerah	Jumlah data: 15 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
31.	Badan Kepegawaian Daerah	Jumlah data: 19 dataset, yang bersumber dari; SIPD e-Walidata dan Data Usulan Badan Pusat Statistik.
32.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Jumlah data: 4 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.
33.	Badan Penghubung Provinsi	Jumlah data: 6 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata.

No.	Perangkat Daerah	Keterangan
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah data: 8 dataset, yang bersumber dari; Data Prioritas Nasional (Bappenas), IKU/ IKK, dan SIPD e-Walidata.
35.	Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah	Jumlah data: 6 dataset, yang bersumber dari; SIPD e-Walidata.
36.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah data: 47 dataset, yang bersumber dari; IKU/ IKK dan SIPD e-Walidata
Jumlah: 36 Perangkat Daerah		1319 Dataset

2. Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata

Target indikator ini 100% karena seluruh Perangkat Daerah atau Produsen Data sebanyak 35 Perangkat Daerah wajib mengumpulkan Dokumen Standar Data Statistik (SDS) dan Metadata Statistiknya (MS) yang merupakan 2 dokumen prasyarat untuk pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia.

Tahun 2025 telah dilakukan penyusunan dan pengumpulan dokumen standar data dan metadata statistik untuk Daftar Data Tahun 2024 oleh seluruh perangkat daerah ke Walidata. Sehingga target tahun 2025 terealisasi sebesar 102,85 % dengan pemenuhan dokumen standar data statistik dan metadata statistik dari 36 Perangkat Daerah atau Produsen Data. dengan rumus hitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah (produsen data) yang telah mengumpulkan SDS dan MS(36)}}{\text{Jumlah keseluruhan perangkat daerah (produsen data)(35)}} \times 100 \% = 102,85 \%$$

- b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	125,9 %	100 %	125,9 %	100 %	102,85 %	100 %
.	Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	93,92 %	100 %	100 %	100 %	102,85 %	100 %

Berdasarkan Tabel Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan efektif dan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari capaian seluruh indikator kinerja yang berada pada angka ≥ 100 persen.

Pada indikator Persentase Data Statistik Sektorial Daerah yang tersedia, realisasi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 masing-masing mencapai 125,9 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada Tahun 2025 realisasi mengalami penurunan menjadi 102,85 persen. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah perangkat daerah (produsen data) bertambah dan mengubah angka pembagiannya yang tadinya 27 perangkat daerah menjadi 35 perangkat daerah. Meskipun terjadi penurunan secara kuantitatif, capaian ini tetap berada di atas target sehingga indikator tetap dinilai tercapai. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam penyediaan data sektoral agar tingkat capaian dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pada indikator Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata, realisasi pada Tahun 2023 sebesar 93,92 persen, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2024, dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 102,85 persen. Tren peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penerapan standar data dan metadata pada perangkat daerah, serta meningkatnya kepatuhan terhadap kebijakan Satu Data Daerah.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2025 kedua indikator kinerja mencapai nilai realisasi yang sama, yaitu 102,85 persen, dan seluruhnya telah melampaui target. Hal ini mencerminkan bahwa penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data statistik sektoral telah berjalan optimal, meskipun masih diperlukan upaya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan peningkatan kualitas tata kelola data guna menjaga keberlanjutan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

**Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir
Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2024	Target 2026
1.	Persentase Data Statistik Sektor Daerah yang tersedia	125,9 %	125,9 %	102,85 %	77,14 %
2.	Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	93,92 %	100%	102,85 %	100 %

Berdasarkan Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir Renstra, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 telah melampaui target jangka menengah (Renstra) yang ditetapkan.

Pada indikator Persentase Data Statistik Sektor Daerah yang tersedia, realisasi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 masing-masing mencapai 125,9 persen, sedangkan target akhir Renstra Tahun 2026 sebesar 77,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target Renstra secara signifikan dan bahkan telah tercapai lebih awal dari waktu yang direncanakan.

Selanjutnya, pada indikator Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata, realisasi pada Tahun 2023 sebesar 93,92 persen, kemudian meningkat menjadi 100 persen pada Tahun 2024, dan telah sesuai dengan target akhir Renstra Tahun 2026, yaitu 100 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator tersebut telah mencapai target jangka menengah yang ditetapkan.

Dengan demikian, kedua indikator kinerja telah menunjukkan kinerja sangat baik, karena realisasi sampai dengan Tahun 2024 telah memenuhi bahkan melampaui target akhir Renstra Tahun 2026. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada upaya mempertahankan konsistensi capaian, peningkatan kualitas data, serta penguatan tata kelola data sektoral agar kinerja tetap berkelanjutan sesuai prinsip Satu Data.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Secara Nasional kedua indikator ini tidak dinilai langsung tetapi termuat dalam Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang nantinya akan menghasilkan Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Oleh karena itu, kedua indikator kinerja ini akan dibandingkan terhadap realisasi pemerintah daerah lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa pemerintah daerah juga sudah

menunjukkan hasil yang baik dan juga melampaui target khususnya terkait Indikator Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia, diantaranya: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal (91,23%), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur (81,66%) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi (80%).

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Dalam rangka pencapaian kedua indikator tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi pemicu dan alternatif solusi yang telah dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Perangkat Daerah

Terbangunnya koordinasi yang intensif antara walidata, walidata pendukung, produsen data, sekretariat forum satu data dan pembina data mendorong peningkatan ketersediaan data yang terintegrasi. Rapat koordinasi, forum satu data, serta pendampingan teknis secara berkala menjadi sarana penyelesaian kendala di masing-masing perangkat daerah.

2. Penyusunan dan Penerapan Rekomendasi Kegiatan, Standar Data dan Metadata

Telah dilakukan penyusunan serta penerapan rekomendasi kegiatan statistik, standar data, metadata, dan kode referensi sebagai acuan bersama. Hal ini mendorong keseragaman format, definisi, dan struktur data sehingga meningkatkan kualitas dan interoperabilitas data antarinstansi.

3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan kepada pengelola data di perangkat daerah. Upaya ini meningkatkan pemahaman terhadap prinsip Satu Data, standar data, serta pentingnya data statistik dalam mendukung perencanaan pembangunan.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara periodik menjadi sarana identifikasi hambatan sekaligus penyusunan tindak lanjut. Melalui evaluasi tersebut, dilakukan perbaikan proses pengumpulan, validasi, dan pembaruan data sehingga capaian indikator dapat terus ditingkatkan.

f. Analisis Program, SDM, dan Anggaran yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)” dengan indikator

Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia dan Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata, didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi dengan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai bidang pengampu, memiliki 7 SDM yang bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran ini. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai walidata, kecukupan jumlah ASN dinilai belum memadai/ belum sesuai dengan beban kerja yang ada, dimana tugas walidata yakni melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta penyebarluasan data. Adapun produsen data yang dimaksud, yakni 36 Perangkat Daerah, yang dimana akan ditangani oleh walidata dengan beberapa *Person in Charge* (PIC). Kemudian untuk tugas penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Provinsi Maluku yang sementara masih diproses, dibutuhkan SDM yang handal untuk pengelolaan portal dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, agar tercapainya sasaran kinerja yang optimal dan menghasilkan data yang berkualitas yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI), dalam hal ini pemahaman data statistik maupun pemahaman tentang Teknologi Informatika, maka dibutuhkan penambahan Sumber Daya Manusia (Staf Teknis) sebanyak 5 orang yakni 4 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 Statistika/ S-1 Matematika dan 1 orang dengan kualifikasi pendidikan S-1 Teknik Informatika/ S-1 Sistem Informasi.

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan tujuan kinerja organisasi adalah:

**Tabel 3.21. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Yang
Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	269.441.800	269.419.012	100	22.788
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	269.441.800	269.419.012	100	22.788
Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	269.441.800	269.419.012	100	22.788

Sasaran 6
Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Tujuan 5 : Mewujudkan Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
Sasaran 1 : Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indikator Kinerja : Persentase Kematangan Keamanan Informasi	
Kinerja Tahun 2025 : Target : 25% Realisasi : 29% Capaian : 100 %	Kinerja Tahun Sebelumnya	
	Tahun 2023 : Target : ? Realisasi : 32,87 % Capaian : 100%	Tahun 2024 : Target : 38,76% Realisasi : 42,32% Capaian : 100%
Perbandingan Kinerja Sasaran dengan Target Akhir RPJMD		
Target Jangka Menengah : 28,28% Realisasi s.d Tahun 2025 : 29% Capaian : 100 %		

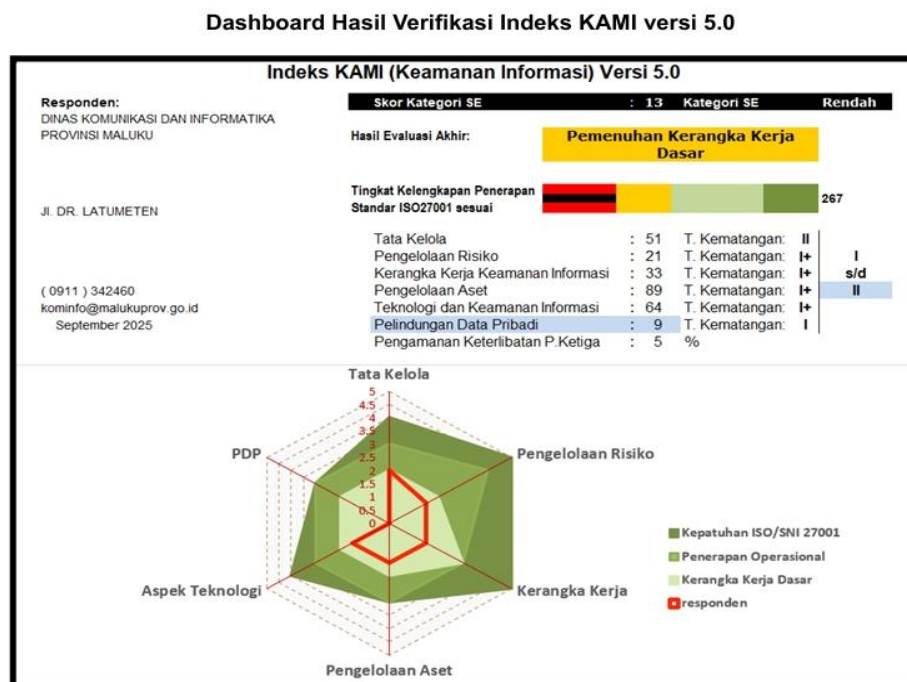
a. Capaian Sasaran 6 Tahun 2025.

Tabel Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2025

Sasaran 6 : Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				
No.	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian
1.	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	25 %	29 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Indeks KAMI disusun berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001.

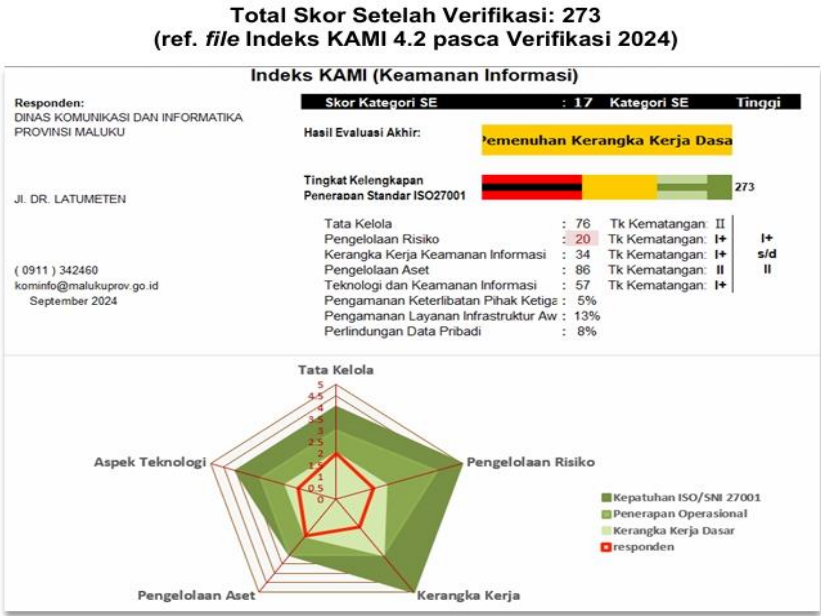
Target tahun 2025 untuk Sasaran 6 adalah 25% dengan penilaian skor 229 dan realisasi atau hasil verifikasi Indeks KAMI Tahun 2025 yaitu 29% dengan penilaian skor 267 dengan kategori sistem elektronik rendah dan status kesiapan Pemenuhan Kerangka Kerja Dasar.



b. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Pada aspek realisasi Indeks KAMI, terdapat perbandingan dengan tahun sebelumnya pada kategori sistem elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Maluku di tahun 2024 adalah kategori sistem elektronik tinggi dan pada tahun 2025 kategori sistem elektronik rendah.

Kategori sistem elektronik ini akan mempengaruhi pada skor akhir dan status kesiapan pengamanan informasi dalam penilaian Indeks KAMI.



elektronik tinggi dan status kesiapan tidak layak berdasarkan penilaian Indeks KAMI versi 4.2 dan tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mendapatkan realisasi verifikasi Indeks KAMI dengan skor 273, nilai realisasi 42,32 %, kategori sistem elektronik tinggi dan status kesiapan tidak layak berdasarkan penilaian Indeks KAMI versi 4.2.

Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mendapatkan realisasi verifikasi Indeks KAMI dengan skor 267, nilai realisasi 29 %, kategori sistem elektronik rendah dan status kesiapan pemenuhan kerangka kerja dasar berdasarkan penilaian Indeks KAMI versi 5.0.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan penilaian Indeks KAMI versi 5.0 di tahun 2025 dari tidak layak menjadi menjadi pemenuhan kerangka kerja dasar dengan kategori sistem elektronik rendah sehingga kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di beberapa aspek penilaian semakin baik.

Rumus untuk mendapatkan realisasi menggunakan penilaian Indeks KAMI versi 4.2 dan Indeks KAMI versi 5.0 :

$$\frac{\text{Nilai Skor Perolehan (273)}}{\text{Nilai Skor Akhir (916)}} \times 100 = 29 \%$$

Nilai skor akhir untuk Indeks KAMI versi 4.2 adalah 645, dan nilai skor akhir untuk Indeks KAMI versi 5.0 adalah 916.

- c. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

**Tabel Perbandingan Kinerja Sasaran Dengan Target Akhir
Renstra**

No.	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026
1.	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	32,87%	42,32 %	29%	28,28%

Jika disandingkan dengan target capaian jangka menengah, realisasi penilaian verifikasi Indeks KAMI Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sudah mencapai target akhir dengan 29 % dengan status kesiapan pemenuhan kerangka kerja dasar.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Rata-Rata Nasional

Tidak adanya standar indikator Provinsi yang harus diikuti, namun ada beberapa Dinas Komunikasi dan informatika di daerah lain seperti Kabupaten serang mendapatkan hasil verifikasi Indeks KAMI 366 atau 40 % dan Dinas Komunikasi dan informatika Provinsi Banten mendapatkan hasil verifikasi Indeks KAMI 542 atau 59 %.

e. Analisis penyebab keberhasilan serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil verifikasi asesor Badan Siber dan Sandi Negara terhadap dokumen, wawancara dan observasi dengan asesi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mengelola Sistem Elektronik Webmail dalam kategori rendah dengan hasil evaluasi akhir pada level Pemenuhan Kerangka kerja Dasar dengan tingkat kelengkapan penerapan standart SNI/ISO 27001 sesuai kategori pada skor 267 atau 29%, hanya saja perlu adanya perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan Badan Siber dan Sandi Negara berdasarkan prioritas yang segera ditindaklanjuti dalam rangka mengoptimalkan penerapan pengamanan data dan informasi sesuai aspek-aspek yang dinilai pada Indeks KAMI.

f. Analisis Program, SDM, dan Anggaran yang menunjang pencapaian Indikator Kinerja.

Pencapaian sasaran “Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dengan indikator Persentase Kematangan Keamanan Informasi didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan Kegiatan Penyediaan Layanan keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah memiliki 5 ASN yang bertanggungjawab dalam mencapai sasaran kinerja ini.

Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah memiliki output yang dihasilkan adalah jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian. Outcome yang dihasilkan adalah peningkatan keamanan informasi, perlindungan data, ketahanan siber dan penerapan persandian.

Realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan tujuan kinerja organisasi adalah:

**Tabel Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE)**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000

C. Realisasi Anggaran

Berikut adalah capaian keuangan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Tahun 2025 :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025 (Rp.)	Realisasi Bulan Desember	Persen (%)	Sisa Anggaran Bulan Desember	Persen (%)
1	2	4	5	6	7	8
	Belanja Daerah	12.861.513.774	11.450.766.004	89,03	1.410.747.770	10,97
	Belanja Langsung	6.951.902.382	6.590.625.204	94,80	361.277.178	5,20
	Belanja Tidak Langsung	5.909.611.392	4.860.140.800	82,2	1.049.470.592	17,8
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.712.889.111	6.557.504.592	85,02	1.155.384.519	14,98
	<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	16.919.865	16.919.865	100	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.727.865	3.727.865	100	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.840.000	5.840.000	100	-	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025 (Rp.)	Realisasi Bulan Desember	Persen (%)	Sisa Anggaran Bulan Desember	Persen (%)
1	2	4	5	6	7	8
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	7.352.000	7.352.000	100	-	100
	<i>Admisitrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.969.655.392	4.920.184.800	82,4	1.049.470.592	17,6
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.909.611.392	4.860.140.800	82,2	1.049.470.592	17,8
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	57.360.000	57.360.000	100	-	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.684.000	2.684.000	100	-	0
	<i>Admisitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	1.440.000	1.440.000	100	0	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1.440.000	1.440.000	100	-	0
	<i>Admisitrasi Umum Perangkat Daerah</i>	317.223.966	315.639.540	99,5	1.584.426	0,5
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.999.500	100	500	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.600.966	52.550.000	99,9	50.966	0,1
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	5.000.000	5.000.000	100	-	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	14.986.000	99,9	14.000	0,1
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234.623.000	233.104.040	99,4	1.518.960	0,6
	<i>Penyediann Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	958.289.888	861.598.757	89,9	96.691.131	10,1
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	198.499.992	189.878.633	95,7	8.621.359	4,3
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	759.789.896	671.720.124	88,4	88.069.772	11,6

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025 (Rp.)	Realisasi Bulan Desember	Persen (%)	Sisa Anggaran Bulan Desember	Persen (%)
1	2	4	5	6	7	8
	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	449.360.000	441.721.630	98,3	7.638.370	1,7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	112.360.000	112.354.000	100	6.000	0
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	132.000.000	125.481.630	95	6.518.370	4,9
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000	198.886.000	99,4	1.114.000	0,6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	5.000.000	100	0	0
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468	2,3
	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.707.286.404	2.644.271.936	97,7	63.014.468	2,3
	Relasi Media	1.546.119.000	1.498.182.000	96,9	47.937.000	3,1
	Penyusunan Konten	999.044.404	986.052.936	98,7	12.991.468	1,3
	Pelayanan Informasi Publik	162.123.000	160.037.000	99	2.086.000	1
	Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.043.351.459	1.852.326.464	90,7	191.024.995	9,3
	<i>Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	2.043.351.459	1.852.326.464	90,7	191.024.995	9,3
	Koordinasi Pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	75.100.000	74.931.500	99,8	168.500	0,2
	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	1.968.251.459	1.777.394.964	90,3	190.856.495	9,7
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	269.441.800	269.419.012	100	22.788	0

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan 2025 (Rp.)	Realisasi Bulan Desember	Persen (%)	Sisa Anggaran Bulan Desember	Persen (%)
1	2	4	5	6	7	8
	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</i>	269.441.800	269.419.012	100	22.788	0
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	269.441.800	269.419.012	100	22.788	0,0
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000	1
	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</i>	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000	1
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	128.545.000	127.244.000	99	1.301.000	1

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan Pencapaian Kinerja

Dari pengukuran sasaran kinerja yang dilakukan pada Bab III dapat disimpulkan capaian sasaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Capaian Sasaran Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

No.	Sasaran Kinerja	Capaian	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	n/a	Masih dalam proses reuiu APIP
2	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	100 %	Sangat Memuaskan
3	Meningkatnya Informasi Publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui Media milik Pemerintah Daerah	100 %	Sangat Memuaskan
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	100 %	Sangat Memuaskan
		100 %	Sangat Memuaskan
5	Meningkatnya Kemampuan Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	100 %	Sangat Memuaskan
		100 %	Sangat Memuaskan
6	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	100%	Sangat Memuaskan
	Rata-Rata Capaian Kinerja	87.5 %	Memuaskan

Pada Tabel 4.1 yang memuat kesimpulan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2025 dan Renstra Tahun 2025-2029 dikategorikan Memuaskan dengan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 87,5 %.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku masih ditemui permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan pencapaian kinerja diantaranya sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Ketidaktersediaannya Dokumen Perencanaan SPBE implementasi dari Peraturan Gubernur Maluku No. 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola SPBE
- b. Keterbatasan Jangkauan Fisik: Sulitnya penarikan kabel jaringan ke beberapa lokasi OPD yang terpisah jauh.
- c. Keamanan Informasi: Meningkatnya risiko serangan siber seiring dengan meluasnya jaringan intra dan pemanfaatan portal
- d. Update Konten Portal: Beberapa unit kerja masih lambat dalam memperbarui data pada portal website.
- e. Kesenjangan Target (Under-targeting): Realisasi 115% menunjukkan target awal tahunan (10 OPD) terlalu konservatif.

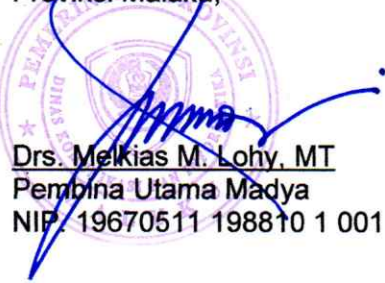
Tindak lanjut dari permasalahan diatas adalah :

- a. Pengembangan tahap utama :
 1. Dokumen Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Maluku;
 2. Dokumen Arsitektur SPBE
 3. Dokumen Peta Rencana SPBE
 4. Clearance Anggaran Belanja TIK
- b. Menggunakan teknologi *wireless* Radio Microwave atau sewa jaringan fiber optik dari Provider (Contoh ; Project E-Metro Telkom) bersama (shared network) untuk memastikan konektivitas tetap terjalin tanpa biaya yang membengkak
- c. Pengembangan dan Penambahan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) untuk mengintegrasikan data informasi serta memastikan jalur aman dan Penguatan firewall dan penerapan protokol keamanan standar sesuai dengan standar keamanan informasi SPBE nasional.

- d. Melakukan pendampingan teknis secara intensif dan menyediakan sistem "input terpadu" yang memudahkan admin di tiap OPD untuk memperbarui informasi secara real-time.
- e. Melakukan penyesuaian target pada revisi rencana kerja tahunan agar lebih selaras dengan potensi kapasitas teknis yang sebenarnya dimiliki

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada periode berikut.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,



Drs. Melkias M. Lohy, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19670511 198810 1 001

L A M P I R A N

RENCANA KERJA (RENJA)

**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Tahun 2025**

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.588.254.476,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.588.254.476,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						15.223.255.476,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	10.098.255.476,00						-	0,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Pengggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	100 persen			-	405.367.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen			3 Dokumen	360.474.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	3 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	7.710.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	7.710.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	8.395.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	8.395.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	14 Laporan			7 Laporan	12.683.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	7 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	100 persen			-	5.936.584.266,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	28 Orang/ Bulan			14 Orang/ Bulan	5.853.006.416,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	14 Orang/ Bulan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen			12 Dokumen	68.280.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan			1 Laporan	7.797.850,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan			6 Laporan	7.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	6 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	100 persen			-	15.748.350,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen			1 Dokumen	5.249.300,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	5.249.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			1 Laporan	5.249.550,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	100 persen			-	181.324.300,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket			1 Paket	38.550.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen			1 Dokumen	5.650.500,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	5.471.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>	2 Dokumen			1 Dokumen	5.387.400,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	10 Orang			5 Orang	66.265.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	5 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang			50 Orang	30.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang			50 Orang	30.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	50 Orang	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100 persen			-	726.805.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	40.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	6 Paket			3 Paket	150.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	3 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	24 Dokumen			12 Dokumen	1.860.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	24 Laporan			12 Laporan	39.982.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	76 Laporan			38 Laporan	469.963.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	38 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100 persen			-	824.840.512,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Paket			1 Paket	298.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Paket	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit			1 Unit	188.479.512,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	0 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	24 Unit			11 Unit	217.681.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	15 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	2 Unit			3 Unit	120.680.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	1.189.356.048,00			-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	24 Laporan			12 Laporan	2.520.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	24 Laporan			12 Laporan	237.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	949.836.048,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	12 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 persen			-	818.230.000,00			-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	100 persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit			14 Unit	238.720.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	14 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	14 Unit			10 Unit	350.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	4 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	200.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningka tan Tata Kelola peny elenggaraa n pemerinta han yang akuntabel dan inovatif	-	1 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit			16 Unit	23.510.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	16 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			2 Unit	6.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif	-	2 Unit	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-			-	2.500.000.000,00						-	0,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	2.500.000.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media														
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	700.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0015	Penyusunan Konten														
			Jumlah Konten Informasi Publik				1 Konten	200.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				5 Orang	100.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				100 Persentase	1.000.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	300.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				1 Rekomendasi	200.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	2.625.000.000,00						-	0,00	
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	2.625.000.000,00			-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda														
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	2 Laporan			1 Laporan	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	2 Layanan			1 Layanan	55.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pemanfaatan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	1 Layanan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE														
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	80 Perangkat Daerah			1 Perangkat Daerah	2.450.000.000,00	Kab. Kepulauan Tanimbar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seram Bagian Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Aru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Tual, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Barat Daya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Buru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan Pemanfaatan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	40 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						140.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-			-	140.000.000,00						-	0,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	-	4 Dokumen			-	140.000.000,00			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen			2 Dokumen	140.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	2 Dokumen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						224.999.000,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-			-	224.999.000,00						-	0,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	-	100 Persen			-	224.999.000,00			-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	100 Persen	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	6 Laporan			3 Laporan	44.740.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	3 Laporan	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	40 Perangkat Daerah			40 Perangkat Daerah	180.259.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningka tan Pemba ngunan infrastruktur yang berkualitas dan merata	-	40 Perangkat Daerah	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							15.588.254.476,00							0,00	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Melkias M. Lohy, MT
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hendrik Lewerissa
Jabatan : Gubernur Maluku
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025 seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ambon, Maret 2025



Pihak Kedua,

Hendrik Lewerissa
Gubernur Maluku



Pihak Pertama,

Drs. Melkias M. Lohy, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 196705111988101001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU

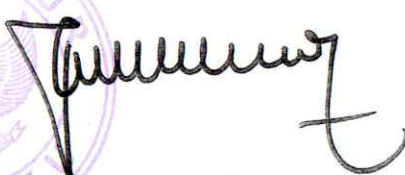
No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB
2	Meningkatnya Layanan Keterbukaan Informasi Publik	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik	42,86%
3	Meningkatnya informasi publik Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui media milik Pemerintah Daerah	Persentase konten informasi yang disebarluaskan melalui media milik Pemerintah Daerah	50%
4	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	29,55%
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Layanan Portal Website Pemerintah Provinsi Maluku	66%
5	Meningkatnya kemampuan pengelolaan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD) yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia (SDI)	Persentase Data Statistik Sektorial Data yang tersedia	71,43%
		Persentase Pemenuhan Standar Data dan Metadata	100%
6	Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persentase Kematangan Keamanan Informasi	25,00%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 3,186,597,320	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp 2,433,402,500	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp 2,362,000,000	APBD

No	Program	Anggaran	Keterangan
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 175,000,000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp 175,000,000	APBD

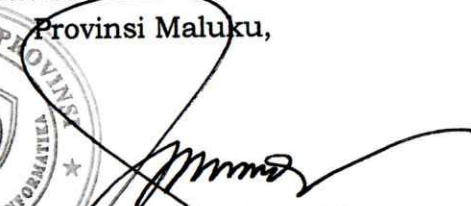
Ambon, Maret 2025

Gubernur Maluku,



Hendrik Lewerissa

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku,



Drs. Melkias M. Lohy, MT
Pembina Utama Madya
NIP/196705111988101001